

Melakukan Pendampingan Pengelolaan Dana Pembiayaan UMKM

Modul Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK)



2023

Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

**MODUL PELATIHAN
MELAKUKAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN UMKM**

Penasehat

Plt Direktur Eksekutif, Manajemen Eksekutif KNEKS
Taufik Hidayat

Penanggung Jawab

Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, Manajemen Eksekutif KNEKS
Putu Rahwidhiyasa

Penyusun

Divisi Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah
Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah
Manajemen Eksekutif KNEKS

Ketua Penyusun

Deputi Direktur Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah, Manajemen Eksekutif
KNEKS Achmad Iqbal

Tim Penulis Ahli Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

Yayat Nurhidayat
Ridha Nugraha
Deni Irawan
R. Hayi Yusuf
Emalia

Tim Penyusun KNEKS

Suci Ramdania

Tim Desain & Layout Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

Boy Konga Kairosa
Julmansyah Putra

Tim Video Grafis Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

Rahmatul Firdaus
Rudi Rahmad Saputra

ISBN

Edisi Pertama, Januari 2024

.....

Penerbit

Manajemen Eksekutif
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr. wb.



Dilansir dari CNBC, dalam lima tahun terakhir perusahaan yang tersandung gugatan mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan mencapai puncaknya pada 2021 dengan 726 permohonan, dan mulai turun pada tahun 2022 menjadi 625, hingga 14 Oktober 2023 menjadi 563 permohonan.

Ketidakmampuan dalam mengelola hutang, seringkali berakibat fatal bagi bisnis. Salah satu penyebab kebangkrutan adalah buruknya pengelolaan hutang/pembiayaan. Pengelolaan keuangan yang buruk menyebabkan perusahaan kehilangan dana karena tidak mampu memantau aliran kas. Perusahaan juga dapat merugi karena pengeluaran yang tidak terkontrol. Manajemen keuangan yang buruk dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.

Pelaku UMKM perlu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam mengelola dana pembiayaan dengan baik. Dengan demikian, pembiayaan yang didapatkan dari Lembaga Keuangan dioptimalkan untuk pertumbuhan bisnis dan tidak digunakan untuk tujuan non-produktif. Oleh karena itu, peran dan kompetensi Pendamping UMKM sangat diperlukan dalam melakukan pendampingan pengelolaan dana pembiayaan. Oleh karena itu, Manajemen Eksekutif KNEKS menyusun **“Modul Pendampingan Pengelolaan Dana Pembiayaan”** yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi Pendamping UMKM.

Penyusunan Modul Pelatihan tersebut telah dilakukan melalui beberapa tahap dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari (1) *Focus Group Discussion* (FGD)

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pelatihan, (2) Pendalaman substansi modul pelatihan, penyesuaian kurikulum pelatihan dan finalisasi rancangan Pelatihan Berbasis Kompetensi; (3) Penyusunan delapan Modul dan Video Grafis; (4) *Focus Group Discussion* (FGD) Review dan Penyempurnaan Modul, dan; (5) Uji Coba Implementasi Modul.

Manajemen Eksekutif KNEKS mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat memberikan dukungan dan kontribusi yang luar biasa pada setiap tahap penyusunan Modul ini yaitu:

1. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), selaku penyusun yang diketuai oleh Bpk. Ridha Nugraha dan para tim ahli Bpk. Deni Irawan, Bpk. Yayat Nurhidayat, Ibu Emalia Tanjung, Bpk. Hayi Yusuf beserta seluruh tim yang terlibat;
2. Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya Keasdepan Pembiayaan dan Investasi UKM yang dipimpin oleh Bpk. Temmy Setya Permana beserta jajarannya dan Keasdepan Pengembangan SDM UKM yang dipimpin oleh Bpk. Renaldy beserta jajarannya;
3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya Direktorat Akses Pembiayaan yang dipimpin oleh Bpk. Anggara *Hayun* Anujuprana beserta jajarannya;
4. Para Reviwer Ahli Bpk. Edian Fahmy dari Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pamulang, Dr. Rambat Lupiyoadi, S.E., M.E dari Universitas Indonesia, Bpk. Amirul Mukminin dari UUS Maybank, Bpk. Samsi, SE dari STAR Training & Consulting dan Bpk. Jefry Pratama dari Code Creative Hub.

Modul pelatihan ini merupakan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang disusun berdasarkan SKKNI Pendamping UMKM No. 181 Tahun 2017 yang berlaku saat ini, sehingga tidak menutup kemungkinan, dikemudian hari terdapat perkembangan dan perubahan.

Besar harapan kami agar materi pelatihan tersebut dapat digunakan oleh berbagai pihak baik Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Asosiasi, Lembaga (Inkubator/Akselerator) maupun Profesi Pendamping UMKM, Pelaku UMKM, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi, Akademisi dan pihak lain terkait dengan aktivitas Pendampingan UMKM. Dengan demikian, turut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas Pendamping UMKM.

Wassalamualaikum, wr.wb.

Jakarta, Desember 2023

Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

Komite Nasional dan Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS)

Ir. Putu Rahwidhiyasa, MBA, CIPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Panduan Penggunaan Modul.....	2
C. Silabus	4
BAB II PENGETAHUAN	11
A. Melakukan Pendampingan Pengelolaan Dana Pembiayaan Sesuai Alokasi Kebutuhan dan Perencanaan Usaha UMKM Dampingan.	12
1. Jenis Akad, Produk, Skema dan Jumlah Pembiayaan yang Diterima UMKM.....	12
2. Alokasi Dana Pembiayaan Sesuai Kebutuhan dan Perencanaan Usaha UMKM.....	21
3. Mengendalikan Risiko Bisnis dan Mengelola Sumber Pendapatan Usaha UMKM Dampingan.....	24
4. Alokasi Pendapatan Usaha, Pengelolaan <i>Cashflow</i> dan Alokasi Pembayaran Angsuran/Rencana Penyelesaian Pembiayaan UMKM Dampingan	26
5. Risiko dan Dampak Penyalahgunaan (<i>side streaming</i>) Dana Pembiayaan UMKM.....	29
B. Mengukur Dampak/ Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha UMKM Dampingan.....	34
1. Pemantauan Pembiayaan UMKM Dampingan	34
2. Dampak Pembiayaan Terhadap Kinerja Bisnis dan Keuangan UMKM Dampingan	37
3. Perubahan Tata Kelola/Manajemen (<i>Governance</i>) & Pengendalian Risiko Usaha	39
C. Mengevaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan	43
1. Ruang Lingkup, Aspek, Metode dan Tahapan Evaluasi Pendampingan	43

2.	Persiapan Peralatan Bahan Evaluasi.....	46
3.	Pelaksanaan Evaluasi.....	48
4.	Penyusunan Laporan Evaluasi Aktivitas Pendampingan.....	54
D.	Evaluasi Pengetahuan.....	59
LAMPIRAN		64
1.	Daftar Istilah.....	64
2.	Referensi.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Risiko dan Mitigasi Risiko Usaha.....	24
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kompetensi Pendamping Akses Pembiayaan UMKM.....	11
--	----

BAB I PENDAHULUAN

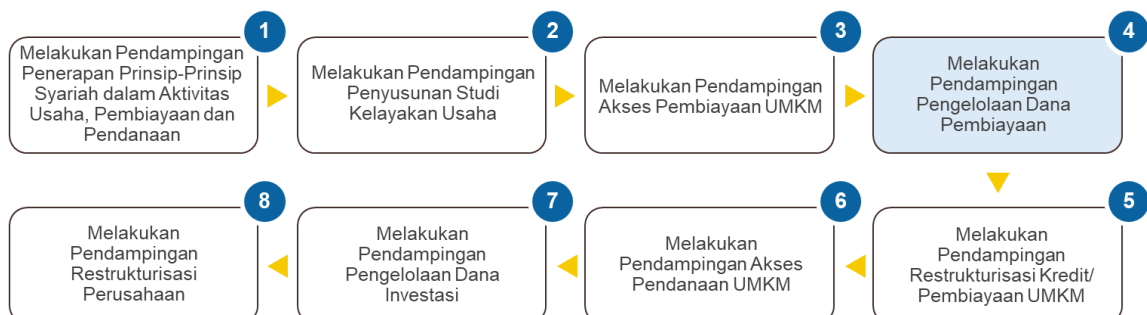
A. Latar Belakang

Tuntutan pembelajaran berbasis kompetensi menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja. Selaras dengan tuntutan tersebut, maka dibutuhkan mekanisme pelatihan yang lebih praktis, aplikatif, serta menarik dilaksanakan sehingga memotivasi para peserta dalam melaksanakan pelatihan yang diberikan. Seiring dengan mudahnya teknologi digunakan, maka materi pelatihan dapat disajikan dengan berbagai media pembelajaran yang dapat diakses secara *offline* dan *online*.

Modul **Pendampingan Pengelolaan Dana Pembiayaan** memberikan gambaran bagi pendamping tentang bagaimana melakukan pengelolaan dana pembiayaan dan menghindari penyalahgunaan dana pembiayaan (*side streaming*) agar pembiayaan yang diterima memberikan dampak positif bagi kinerja dan perkembangan bisnis UMKM dampingan.

Modul ini merupakan bagian dari delapan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang terdiri dari empat modul pelatihan mengacu SKKNI Pendampingan UMKM No. 181 Tahun 2017 dan empat modul Non-SKKNI. Modul ini digunakan setelah Modul Pendampingan Akses Pembiayaan.

Alur Penggunaan Modul Pelatihan



B. Panduan Penggunaan Modul

Beberapa ketentuan panduan penggunaan materi yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Modul ini diformulasikan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu:
 - a) Buku Pelatihan, berupa bahan bacaan yang mengacu pada silabus;
 - b) Buku Penilaian, yang merupakan buku *assessment yang dimiliki assessor* untuk menilai peserta pelatihan atau asesi, terdiri dari lembar evaluasi melalui soal-soal pengetahuan beserta formatnya, lembar instruksi kerja yang memuat keterampilan dan sikap kerja, serta evaluasi personal dan;
 - c) Buku Kerja, digunakan oleh peserta selama pelatihan yang berisi dari format-format yang dapat digunakan dalam praktek penyusunan studi kelayakan usaha.

Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai referensi dalam media pembelajaran bagi peserta pelatihan dan instruktur/pembimbing, agar pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Modul ini dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan PBK dengan penggunaannya dapat dikembangkan dan dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan, materi ini terdiri dari:
 - a. Pengetahuan.
 - b. Keterampilan dan Sikap Kerja.
 - c. Evaluasi.
 - d. Lampiran:
 - 1) Daftar istilah.
 - 2) Daftar referensi.
 - 3) Unit kompetensi.
3. Slide presentasi dan video merupakan kelengkapan yang dapat dijadikan referensi bagi para instruktur.

4. Peran instruktur terkait dengan penggunaan modul, antara lain:
 - a. Instruktur dapat menggunakan modul ini yang dilengkapi dengan referensi sumber lainnya seperti buku, video, file presentasi dan lain-lain sehingga diharapkan modul ini dapat diimplementasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga pelatihan.
 - b. Proses pembelajaran dapat disampaikan dengan menggunakan berbagai sumber yang menguatkan peserta pelatihan, baik melalui tahapan persiapan, pelaksanaan di kelas, praktek, melakukan investigasi, menganalisa, mendiskusikan, tugas kelompok, presentasi, serta menonton video.
 - c. Keseluruhan materi yang tersedia sebagai referensi dalam buku ini dapat menjadi bahan dan gagasan untuk dikembangkan oleh instruktur dalam memperkaya materi pelatihan yang akan dilaksanakan.
5. Evaluasi pencapaian kompetensi peserta dapat dilaksanakan sesuai dengan proses penilaian berupa soal tertulis, wawancara, instruksi demonstrasi dan/atau standard produk yang dipersiapkan oleh instruktur.
6. Referensi merupakan literatur yang menjadi acuan dalam penyusunan buku panduan pelatihan ini.
7. Lampiran merupakan bagian yang berisikan lembar kerja serta bahan yang dapat digunakan sebagai berkas kelengkapan pelatihan.

C. Silabus

Unit Kompetensi	: Melakukan Pendampingan Pengelolaan Dana Pembiayaan UMKM
Kode Unit	: Tidak tersedia
Perkiraan Waktu Pelatihan	: 2 JP @45 menit
Metode Pelatihan	: Luring /Daring/Blended(*)
Capaian Unit Kompetensi	: Terlaksananya pendampingan pengelolaan dana pembiayaan UMKM

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	INDIKATOR UNJUK KERJA	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN DAN SIKAP	DURASI
1. Melakukan pendampingan pengelolaan dana pembiayaan sesuai alokasi kebutuhan dan perencanaan usaha UMKM dampingan	1.1 Jenis akad, produk, skema dan jumlah pembiayaan yang diterima UMKM diidentifikasi 1.2 Alokasi dana pembiayaan sesuai kebutuhan dan perencanaan usaha UMKM diidentifikasi 1.3 Pengendalian risiko bisnis dan sumber pendapatan usaha UMKM Dampingan dianalisis 1.4 Alokasi pendapatan usaha, pengelolaan <i>cashflow</i> dan alokasi pembayaran angsuran/ rencana penyelesaian	1.1 Terlaksananya pendampingan pengelolaan dana pembiayaan sesuai alokasi kebutuhan dan perencanaan UMKM dampingan dengan tepat	Penjelasan tentang: 1.1 Jenis akad, produk, skema dan jumlah pembiayaan yang diterima UMKM a. Dokumen pembiayaan UMKM Dampingan disiapkan - <i>Offering Letter</i> - Jadwal Angsuran - Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Agunan (jika terdapat agunan yang diserahkan) b. Identifikasi pembiayaan yang diterima UMKM Dampingan - Jenis Akad - Produk	a. Mengidentifikasi jenis akad, produk, skema dan jumlah pembiayaan yang diterima UMKM b. Mengidentifikasi alokasi dana pembiayaan sesuai kebutuhan dan perencanaan usaha UMKM c. Menganalisa pengendalian risiko bisnis dan sumber pendapatan usaha UMKM Dampingan d. Menganalisa alokasi pendapatan usaha, pengelolaan <i>cashflow</i> dan alokasi pembayaran angsuran/ rencana penyelesaian pembiayaan UMKM Dampingan	40"



	pembiayaan UMKM Dampingan dianalisis 1.5 Risiko dan dampak penyalahgunaan (<i>side streaming</i>) dana pembiayaan UMKM Dampingan diidentifikasi		- Jumlah - Jangka Waktu - Tujuan Pembiayaan - Kondisi dan Persyaratan 1.2 Alokasi dana pembiayaan sesuai kebutuhan dan perencanaan usaha UMKM a. Pemisahan pengelolaan keuangan usaha dan Pribadi pemilik usaha b. Identifikasi kebutuhan dan perencanaan usaha UMKM Dampingan c. Pengalokasian dana pembiayaan - Penggunaan dana pembiayaan sesuai tujuan pembiayaan - Perencanaan <i>cashflow</i> dan rencana penggunaan/ penarikan dana pembiayaan d. Implementasi pengelolaan keuangan sesuai perencanaan dan pembukuan 1.3 Pengendalian risiko bisnis dan sumber pendapatan	e. Mengidentifikasi Risiko dan dampak penyalahgunaan (<i>side streaming</i>) dana pembiayaan UMKM Dampingan diidentifikasi	
--	---	--	--	---	--

			usaha UMKM Dampingan dianalisis a. Aspek risiko bisnis (usaha) dan atau proyek UMKM Dampingan b. Pengendalian (mitigasi) risiko bisnis dan atau risiko pelaksanaan proyek UMKM Dampingan c. Mengamankan sumber pendapatan dan profitabilitas usaha dan atau proyek UMKM Dampingan 1.4 Alokasi pendapatan usaha, pengelolaan <i>cashflow</i> dan alokasi pembayaran angsuran/ rencana penyelesaian pembiayaan UMKM Dampingan dianalisis a. Monitoring tingkat profitabilitas usaha dan atau proyek b. Pengelolaan <i>cashflow</i> usaha c. Pengalokasian dana angsuran pembiayaan 1.5 Risiko dan dampak penyalahgunaan (<i>side streaming</i>) dana		
--	--	--	---	--	--



			pembiayaan UMKM Dampingan diidentifikasi a. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan (<i>side streaming</i>) dana pembiayaan b. Jenis dan bentuk penyalahgunaan (<i>side streaming</i>) dana pembiayaan c. Risiko <i>side streaming</i> d. Dampak <i>side streaming</i> terhadap bisnis UMKM Dampingan		
2. Mengukur dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM dampingan	2.1 Pemantauan pembiayaan UMKM Dampingan dilakukan 2.2 Pengukuran dampak pembiayaan terhadap kinerja bisnis dan keuangan UMKM Dampingan dianalisa	2.1 Dihasilkannya dokumen hasil pengukuran dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM dengan metoda dan aspek yang tentang ditentukan dengan cermat	Penjelasan tentang : 2.1 Pemantauan pembiayaan UMKM Dampingan a. Monitoring pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan UMKM Dampingan b. Monitoring kualitas pembiayaan UMKM Dampingan c. Pengaruh kualitas pembiayaan terhadap akses pembiayaan UMKM Dampingan 2.2 Analisa dampak pembiayaan terhadap kinerja bisnis dan keuangan UMKM Dampingan	2.1 Melakukan Pemantauan pembiayaan UMKM Dampingan 2.2 Mengukur dampak pembiayaan terhadap kinerja bisnis dan keuangan UMKM Dampingan	35"



			a. Indikator/aspek pengukuran b. Metode pengukuran c. Analisa dampak pembiayaan terhadap kinerja bisnis dan kesehatan keuangan d. Interpretasi hasil analisa		
3. Mengevaluasi Pengelolaan dana Pembiayaan	3.1 Ruang lingkup, aspek, metode dan tahapan evaluasi pendampingan pengelolaan dana pembiayaan dan pengukuran dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM dampingan diidentifikasi 3.2 Peralatan dan bahan disiapkan 3.3 Evaluasi pendampingan pengelolaan dana pembiayaan dan pengukuran dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM dampingan dilakukan 3.4 Laporan evaluasi aktivitas pendampingan	3.1 Terlaksananya evaluasi pengelolaan dana pembiayaan dan pengukuran dampak dengan cermat serta rekomendasi perbaikan bagi UMKM dampingan 3.2 Dihasilkannya dokumen hasil evaluasi pendampingan pengelolaan dana pembiayaan UMKM Dampingan	Penjelasan tentang : 3.1 Identifikasi ruang lingkup, aspek, metode dan tahapan evaluasi pendampingan pengelolaan dana pembiayaan dan pengukuran dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM dampingan 3.2 Persiapan peralatan, bahan evaluasi pendampingan pengelolaan dana pembiayaan dan pengukuran dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM dampingan 3.3 Pelaksanaan Evaluasi a. Evaluasi dan rekomendasi perbaikan pengelolaan dana pembiayaan UMKM Dampingan b. Evaluasi pengukuran dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha dan rekomendasi	3.1 Mengidentifikasi ruang lingkup, aspek, metode dan tahapan evaluasi pendampingan pengelolaan dana pembiayaanss 3.2 Menyiapkan Peralatan dan bahan 3.3 Melakukan evaluasi terhadap aspek bisnis dan pembiayaan/ pendanaan 3.4 Menyusun laporan evaluasi Aktivitas Pendampingan pengelolaan dana pembiayaan	15"

	pengelolaan dana pembiayaan dan pengukuran dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM Dampingan disusun		perbaikan 3.4 Penyusunan laporan evaluasi aktivitas pendampingan pengelolaan dana pembiayaan dan pengukuran dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM Dampingan		
--	---	--	--	--	--



Pendamping harus memastikan kesesuaian penggunaan dana pembiayaan yang diterima dengan alokasi dan perencanaan usaha serta mewaspadai konsekuensi penyalangunaan dana (*side streaming*) terhadap usaha UMKM

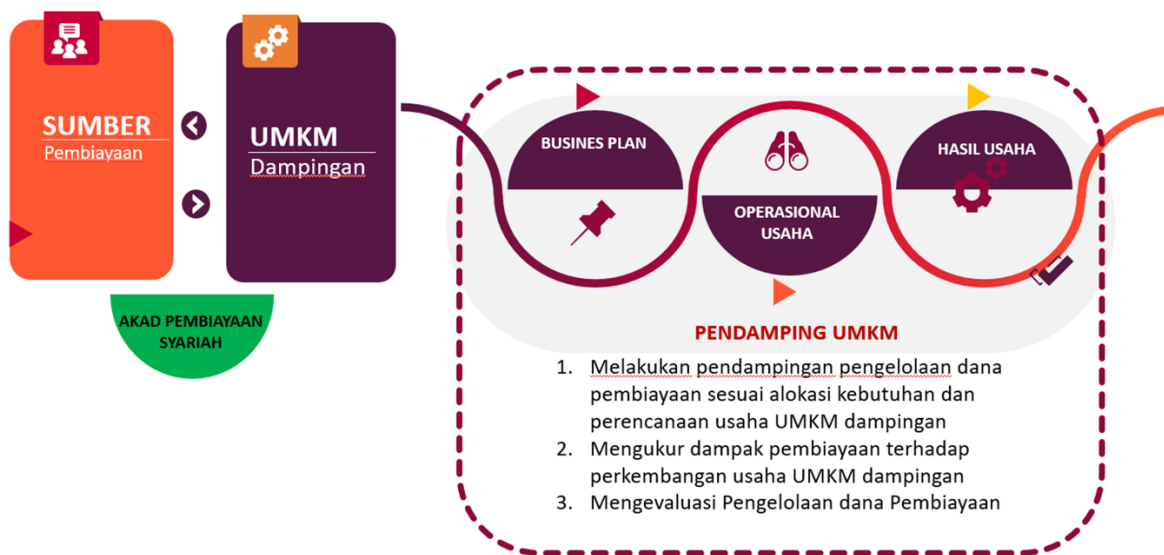


BAB II

PENGETAHUAN

Modul ini menyajikan bahan materi kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pendamping dalam pengelolaan dana pembiayaan UMKM yang terdiri dari tiga kompetensi yang di ilustrasikan dengan gambar berikut ini:

Gambar 2. 1 Kompetensi Pendamping Akses Pembiayaan UMKM



Modul ini adalah lanjutan dari modul Pendamping akses pembiayaan UMKM dimana seorang pendamping UMKM yang UMKM dampingan nya sudah layak *scaleup* berkembang menjadi usaha kecil dan menengah bahkan besar, maka UMKM tersebut layak mendapatkan akses pembiayaan sesuai perkembangan nya. Setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah maka dalam modul ini akan dibahas bagaimana seorang pendamping UMKM melakukan pendampingan pengelolaan dana pembiayaan sesuai alokasi kebutuhan dan perencanaan usaha UMKM dampingan, mengukur dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM dampingan dan mengevaluasi pengelolaan dana pembiayaan UMKM.

A. Melakukan Pendampingan Pengelolaan Dana Pembiayaan Sesuai Alokasi Kebutuhan dan Perencanaan Usaha UMKM Dampingan.

Pendampingan terhadap pengelolaan dana UMKM merupakan hal penting agar UMKM dapat mengelola dana sesuai dengan akad, produk, skema dilakukan dengan Lembaga keuangan Syariah.

1. Jenis Akad, Produk, Skema dan Jumlah Pembiayaan yang Diterima UMKM

a. Dokumen pembiayaan UMKM dampingan

Pendamping memeriksa dokumen-dokumen pembiayaan yang diterima UMKM agar mudah memberikan arahan dalam pengelolaan dananya. Adapun dokumen yang harus disiapkan adalah

1) Offering *letters*, pada konteks pembiayaan UMKM.

Offering letter (OL) merupakan surat penawaran resmi yang dari pihak yang memberikan pembiayaan kepada UMKM. *Offering letter* juga diberikan oleh pihak pemberi pembiayaan sebagai bentuk persetujuan pengajuan pembiayaan disertai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. UMKM dapat menolak maupun menerima penawaran pembiayaan disertai seluruh syarat dan ketentuannya tersebut.

Offering letter ini biasanya mencakup jenis akad pembiayaan, jumlah pembiayaan yang ditawarkan, tingkat bagi hasil atau margin, jangka waktu pembiayaan, syarat-syarat pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lain terkait pembiayaan yang diberikan. Selain itu, *offering letter* berisi jaminan atau syarat keamanan yang perlu dipenuhi sebagai bagian dari pembiayaan tersebut. Ini adalah dokumen penting dalam menjalin kesepakatan antara pihak pemberi

pembiayaan dan UMKM yang mencari sumber dana untuk pertumbuhan atau pengembangan bisnis mereka.

Sebelum menerima tawaran, UMKM sebaiknya memahami isi *offering letter* dengan cermat dan, jika diperlukan, berkonsultasi dengan penasehat keuangan atau hukum untuk memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya konsekuensi dan syarat-syarat yang terkait dengan pembiayaan tersebut.

2) Jadwal Angsuran.

Jadwal Angsuran merupakan jadwal pembayaran secara berkala yang harus diikuti oleh UMKM untuk melunasi pembiayaan yang mereka terima. Jadwal ini mencantumkan tanggal jatuh tempo, jumlah angsuran, serta durasi atau jangka waktu pembiayaan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang jadwal angsuran bagi UMKM

- a) Tanggal jatuh tempo, ini adalah tanggal ketika UMKM harus melakukan pembayaran angsuran. Biasanya, jadwal ini mencantumkan tanggal jatuh tempo bulanan atau sesuai dengan frekuensi yang disepakati antara UMKM dan pemberi pembiayaan.
- b) Jumlah angsuran, jumlah yang harus dibayarkan oleh UMKM pada setiap tanggal jatuh tempo. Jumlah ini terdiri dari sejumlah pokok dan bagi hasil atau margin, jika pembiayaan tersebut dikenakan bagi hasil atau margin.
- c) Jangka waktu pembiayaan: Jangka waktu pembiayaan menunjukkan berapa lama pembiayaan akan dilunasi sepenuhnya. Misalnya, pembiayaan mungkin memiliki jangka waktu 12 bulan, 24 bulan, atau lebih, tergantung pada jenis dan

besarnya pembiayaan serta perjanjian antara UMKM dan pemberi pembiayaan.

- d) Frekuensi pembayaran: Jadwal angsuran juga mencantumkan seberapa sering UMKM harus melakukan pembayaran angsuran, seperti bulanan, mingguan, atau sesuai dengan perjanjian.
- e) Total pembayaran, total jumlah yang akan dibayarkan oleh UMKM selama durasi pembiayaan jika mereka mengikuti jadwal angsuran dengan benar. Ini mencakup jumlah pokok dan bagi hasil atau margin.
- f) Perincian bagi hasil atau margin, mengestimasi jumlah margin yang dibebankan kepada UMKM atau bagi hasil yang akan dikeluarkan oleh UMKM pada setiap periode perjanjian usaha.

Jadwal angsuran penting dianalisis bersama oleh pendamping dan UMKM agar dapat mengestimasi kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dengan mengikuti jadwal ini, UMKM dapat merencanakan pembayaran mereka dan memastikan bahwa mereka tetap pada jalur untuk melunasi utang mereka sesuai dengan perjanjian. Jika terjadi kesulitan keuangan atau keterlambatan dalam pembayaran, segera dikomunikasikan dengan pemberi pembiayaan dan mencari solusi yang sesuai.

3) Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Agunan.

Pendamping harus melihat, memeriksa, dan menganalisis dokumen perjanjian pembiayaan termasuk pengikatan agunan antara pemberi pembiayaan dengan UMKM dampingan yang sesuai dengan Syariah, untuk memastikan bahwa UMKM memahami sepenuhnya isi perjanjian dan memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip Syariah. Beberapa Langkah penting bagi pendamping dalam menganalisis dokumen terkait perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan.

a) Periksa Kesesuaian dengan Prinsip Syariah:

- Pastikan perjanjian pembiayaan dan agunan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan bunga (riba), larangan unsur spekulasi (*gharar*), dan larangan aktivitas haram lainnya.
- Periksa apakah perjanjian menggunakan prinsip-prinsip syariah tertentu seperti mudarabah, musyarakah, murabahah atau akad lainnya yang sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh UMKM dampingan. Pastikan UMKM dampingan memahami prinsip-prinsip tersebut dan bagaimana mereka menerapkan sesuai perjanjian.

b) Agunan/Jaminan

- Jika ada agunan yang harus diajukan, pastikan memahami jenis agunan yang diminta dan tindakan yang perlu diambil untuk mengikat agunan tersebut.
- Periksa apa yang akan terjadi jika gagal melunasi pembiayaan dan bagaimana agunan akan dikelola dalam konteks prinsip syariah.
- Periksa setiap ketentuan khusus dalam perjanjian, termasuk hak dan kewajiban UMKM serta lembaga keuangan terkait agunan. Pastikan telah memahami implikasi setiap ketentuan ini dan siap untuk mematuhi.

b. Identifikasi Pembiayaan yang Diterima UMKM Dampingan

Hasil dari pendampingan terhadap pendataan dan analisis dokumen pengelolaan dana pembiayaan UMKM, langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi terhadap pembiayaan yang diterima UMKM yaitu melakukan hal-hal sebagai berikut:



1) Tujuan Pembiayaan.

Tujuan pembiayaan syariah bagi UMKM adalah memastikan pemenuhan kebutuhan keuangan atau modal usaha dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat tercapai maqoshid syariahnya (ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip Syariah). Pada konteks bisnis UMKM dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan situasi bisnis masing-masing UMKM.

- a) Modal usaha: UMKM sering membutuhkan pembiayaan syariah untuk mendapatkan modal tambahan guna memulai usaha baru atau memperluas operasi yang sudah ada. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk membeli inventaris, peralatan, atau modal kerja.
- b) Pengembangan Bisnis: Pembiayaan syariah dapat membantu UMKM mengembangkan bisnis mereka, seperti membuka cabang baru, menggantikan peralatan yang usang, atau memperluas lini produk atau layanan.
- c) Pendanaan Proyek Khusus: Jika UMKM memiliki proyek khusus yang memerlukan investasi tambahan, seperti perluasan gudang atau produksi, pembiayaan syariah dapat digunakan untuk mendukung proyek tersebut.
- d) Pembiayaan Syariah Working Capital: Pembiayaan syariah dapat membantu UMKM menjaga likuiditas dan memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, atau pembiayaan siklus produksi dan penjualan.
- e) Manajemen Utang: Kadang-kadang UMKM menggunakan pembiayaan syariah untuk mengelola utang yang ada, seperti konsolidasi utang atau pengurangan beban bunga dengan beralih ke pembiayaan syariah yang tidak melibatkan bunga (riba).

- f) Ekspansi Pasar: Pembiayaan syariah dapat digunakan untuk mendukung ekspansi pasar, seperti memasuki pasar ekspor atau mengembangkan strategi pemasaran yang lebih luas.
- g) Kebutuhan Darurat: Terkadang UMKM menghadapi situasi darurat yang memerlukan sumber dana tambahan, seperti perbaikan mendadak atau penanganan masalah keuangan yang mendesak.

2) Jenis Akad

Jenis akad yang digunakan tergantung dari bisnis yang dilakukan UMKM, jika diklasifikasikan maka pendamping sudah dapat memberikan arahan kepada UMKM beberapa jenis akad berikut:

*Jenis-jenis akad serta skema pembiayaan berdasarkan akad syariah dapat lihat di **"Modul Pendampingan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Aktivitas Usaha, Pembiayaan dan Pendanaan"***

a) Akad jual beli.

Pada akad jual beli digunakan dalam pembiayaan modal kerja ataupun investasi, baik dengan akad murabahah, *istisna*, maupun *bai' salam*. Konsekuensi dari akad ini ketika sudah terjadi akad, UMKM harus mengembalikan seluruh hutangnya walaupun usahanya mengalami kebangkrutan baik karena kesalahan manajemen usaha maupun terkena bencana alam.

Contoh kasus pada akad jual beli:

Pak Aceng memerlukan mesin potong ayam dan pengolahan seharga Rp. 500.000.000 dan Pak Aceng bersedia membeli mesin kepada Lembaga keuangan Rp. 600.000.000,-, Pak Aceng akan membayar angsuran kepada lembaga keuangan syariah selama 5

tahun dengan angsuran sebesar Rp. 8.333.333 perbulan. Usaha Pak Aceng mengalami musibah dan Pa Aceng tidak mampu membayar bulanan. Dari kasus tersebut secara prinsip Pak Aceng harus membayar sisa hutang yang belum dibayar, maka dengan akad ini pendamping dan UMKM harus mempertimbangkan ketika terjadi kondisi seperti kasus diatas.

b) Akad Kerjasama

Akad bagi hasil (*profit-sharing agreement*) digunakan dalam pembiayaan berbasis kerjasama dengan akad Mudarabah, Musyarakah dan lain-lain. Lembaga Keuangan Syariah dan UMKM bekerjasama dalam suatu usaha, proyek atau investasi. Konsekuensi dari adanya kerjasama tersebut adalah berbagi keuntungan maupun kerugian.

Contoh:

Pak Nugi mengajukan pembiayaan ke Lembaga Keuangan Syariah Kreatif untuk beternak ayam pedaging sebanyak 5.000 ekor sesuai dengan kapasitas kandang yang Pak Nugi miliki, dari hasil wawancara diketahui biaya pemeliharaan sampai modal kerja (DOC, pakan, sewa kandang dan lain-lain membutuhkan dana Rp. 100.000.000,00. Atau harga pokok Rp. 20.000/ekor. Usaha tersebut disepakati ketentuan sebagai berikut:

Kontrak Mudarabah dengan kesepakatan nisbah bagi hasil 30%
LKS : 70% Pak Amar

Hasil panen selama 35 hari adalah sebagai berikut :

Terjadi mortalitas (kematian) 5% dari 5.000 ekor.

Berat panen rata-rata 1.25 kg perekor x 4.700 = 5.938 kg

Harga panen:

Rp 20.000 /kg x 5.938 = Rp.118.750.000

Keuntungan:

118.750 – 100.000.000 = Rp. 18.750.000

Bagi Hasil LKS 30% = Rp. 5.625.000

Keuntungan UMKM = Rp. 13.125.000

Keuntungan dapat berubah seiring dengan pendapatan dan biaya usaha UMKM, namun apabila terjadi kerugian maka:

- LKS menanggung kerugian dana.
- UMKM menanggung kerugian tenaga dan waktu.

Catatan lain: Perhitungan pembagian dilakukan secara proporsional dan sesuai nisbah yang telah disepakati.

c) Akad Jasa

Jenis akad jasa dalam pembiayaan syariah adalah sebuah perjanjian yang digunakan dalam transaksi keuangan berdasarkan prinsip prinsip syariah, di mana satu pihak (penyedia jasa) memberikan jasa kepada pihak lain (penerima jasa) dengan imbalan tertentu. Contoh akad yang digunakan adalah dengan akad ijarah. Dimana pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyewakan tempat kepada UMKM, dan UMKM bayar jasa sewa setiap bulan.

Contoh lain sewa barang dengan beralih kepemilikan (*ijarah muntahiya bit-tamlik*). UMKM mengajukan kendaraan angkutan

untuk keperluan pabrik dengan nilai Rp. 100.000.000, pihak LKS membeli kendaraan Rp. 100.000.000, kemudian menyewa belikan kepada UMKM dengan pembayaran Rp 3.500.000 perbulan selama 36 bulan dengan jumlah sebesar Rp. 126.000.000, jika pembayaran lancar sampai 36 bulan, maka kendaraan beralih kepemilikan menjadi milik UMKM. Dalam hal ini LKS memiliki keuntungan sebesar Rp. 26.000.000,-.

3) Produk

Kondisi usaha UMKM dihitung dengan kecermatan yang baik, agar pada saat kerjasama dengan Lembaga keuangan mudah menentukan produk yang diperlukan. Untuk usaha peternakan ayam broiler, penanaman padi dan usaha pertanian yang sejenis maka produk yang tepat adalah dengan skema pembayaran setelah panen. Jika usaha UMKM pada produksi atau perdagangan yang pendapatannya dapat diperkirakan setiap bulan, maka dipilih produk angsuran. Dari kasus seperti diatas maka pendamping wajib memahami usaha UMKM dampingan secara riil, sehingga memudahkan dalam memilih produk dan menghitung *cashflow*.

4) Jumlah dan Jangka Waktu.

Jumlah pembiayaan yang akan diajukan dalam kepada pihak LKS, harus dihitung secara detail, sehingga dapat memilah sisi bisnis yang harus dibiayai. Sedangkan jangka waktu sangat tergantung dari kemampuan bayar UMKM sesuai dengan *cashflow* yang dibuat dari hasil pengalaman empiris UMKM.

5) Kondisi dan Persyaratan.

Kondisi usaha UMKM merujuk kepada situasi atau keadaan yang menggambarkan bagaimana usaha tersebut beroperasi, berkembang, dan berkinerja. Kondisi usaha UMKM dapat mencakup berbagai aspek, termasuk keuangan, operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan lingkungan eksternal yang memengaruhi usaha tersebut. Kondisi usaha tersebut dapat menjadi acuan analisis dalam memenuhi syarat pembiayaan, sehingga UMKM dapat memperkirakan *cashflow* dan mendata persyaratan untuk mengajukan pembiayaan.

2. Alokasi Dana Pembiayaan Sesuai Kebutuhan dan Perencanaan Usaha UMKM

Dana pembiayaan yang diterima oleh UMKM harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan usaha UMKM, sehingga usaha UMKM meningkat dan terjaga keberlangsungan usahanya. Dalam menggunakan dana pembiayaan, UMKM perlu mematuhi kondisi & persyaratan dari Lembaga Keuangan Syariah pemberi dana. Oleh karena itu, pendamping perlu melakukan pendampingan terhadap UMKM dampingannya sebagai berikut:

a. Pisahkan pengelolaan keuangan usaha dengan pribadi pemilik usaha;

Pemisahan pengelolaan keuangan usaha dan pribadi pemilik usaha adalah prinsip yang sangat penting dalam manajemen keuangan yang sehat. Ini mengacu pada praktik memisahkan dana dan akun keuangan yang digunakan untuk operasional usaha dari akun pribadi pemilik usaha. Dengan memisahkan kedua aspek ini, pemilik usaha dapat mencapai beberapa manfaat. Pertama, pemisahan ini membantu menciptakan transparansi keuangan yang lebih baik, memungkinkan pemilik untuk memantau kesehatan finansial usaha secara lebih efektif. Ini juga mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan, yang diperlukan untuk mengukur kinerja usaha, memenuhi kewajiban perpajakan, dan



memenuhi persyaratan perbankan jika pemilik mencari pembiayaan tambahan.

Selain itu, pemisahan keuangan usaha dan pribadi juga melindungi keberlanjutan usaha. Dengan akun terpisah, risiko mengalami gangguan finansial yang disebabkan oleh kebutuhan pribadi atau keputusan pribadi pemilik usaha dapat diminimalkan. Ini berarti usaha dapat tetap beroperasi secara mandiri dan terus berkembang tanpa terganggu oleh masalah pribadi.

b. Gunakan dana pembiayaan sesuai kebutuhan pengembangan usaha;

- Identifikasi Kebutuhan. Pertama-tama, identifikasi dengan cermat kebutuhan keuangan usaha UMKM dampingan. Ini termasuk modal awal, modal kerja, investasi dalam peralatan, sumber daya manusia, pemasaran, dan lain-lain.
- Pengalokasian dana. Pengalokasian dana harus cermat, oleh karena itu harus membuat rencana bisnis yang komprehensif. Rencana bisnis harus mencakup proyeksi pendapatan, biaya, laba, dan aliran kas. Ini juga harus mencakup tujuan jangka pendek dan panjang serta strategi untuk mencapainya.
- Prioritaskan Kebutuhan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, prioritasi, kemudian tentukan kebutuhan mana yang paling mendesak dan yang memiliki dampak terbesar pada pertumbuhan usaha.
- Pilih Sumber Dana. Tentukan dari mana dana akan diperoleh, sumber dana dapat berasal dari modal sendiri, pinjaman dari bank syariah atau lembaga keuangan syariah, pembiayaan melalui akad syariah.

- Jangan melampaui kemampuan pembayaran. Saat mengalokasikan dana, pastikan tidak melampaui kemampuan untuk membayar kembali pinjaman atau memenuhi kewajiban keuangan lainnya. Perhitungkan kemampuan usaha untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mengatasi biaya pembiayaan.
- Evaluasi dan perbarui. Lakukan evaluasi berkala terhadap alokasi dana dan perencanaan usaha UMKM dampingan. Sesuaikan alokasi dana sesuai dengan perkembangan usaha dan perubahan kebutuhan.

c. Gunakan dana pembiayaan sesuai peruntukkan pembiayaan;

Saat UMKM mendapatkan pembiayaan dari pihak eksternal, baik perorangan maupun lembaga keuangan, maka UMKM harus menggunakan dana pembiayaan sesuai komitmen yang disepakati dalam *offering letter* dan perjanjian pembiayaan. Dalam beberapa kasus, seperti pembiayaan berbasis jual beli, jika UMKM dampingan membeli barang tidak sesuai dengan perjanjian, maka akad jual beli tersebut bisa dianggap tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya yaitu barang sebagai objek jual beli.

d. Lakukan pencatatan transaksi keuangan usaha;

Setiap transaksi keuangan harus dicatat dan diadministrasikan dengan baik. Bukti-bukti transaksi seperti invoice penjualan, faktur pembelian, bukti pembayaran sewa tempat usaha, pembayaran utilitas tempat usaha (listrik, air, gas dsb). Pelaku UMKM saat ini sudah bisa memanfaatkan jasa layanan digital mulai dari Kasir/Penjualan, Pengelolaan Inventory, Pembukuan, Hingga Laporan Keuangan.

3. Mengendalikan Risiko Bisnis dan Mengelola Sumber Pendapatan Usaha UMKM Dampingan

Aspek risiko dalam bisnis UMKM sangat beragam dan dapat mempengaruhi kesuksesan proyek tersebut. Berikut adalah beberapa aspek risiko sekaligus mitigasi risiko yang perlu diperhatikan dalam usaha UMKM dalam rangka menjaga sumber pendapatan/*repayment capacity* untuk membayar angsuran pembiayaan dan menjaga keberlangsungan usaha.

a. Risiko Usaha dan Pengendalian Risiko (Mitigasi Risiko).

Tabel 2. 1 Risiko dan Mitigasi Risiko Usaha

Jenis Risiko	Risiko	Mitigasi Risiko
Risiko Keuangan	• Keterbatasan modal, sehingga kesulitan dalam pembiayaan usaha. • Fluktuasi pendapatan (musiman) dapat mempengaruhi kemampuan UMKM untuk membiayai usaha.	▪ Manajemen keuangan yang baik, termasuk perencanaan anggaran dan pemantauan pengeluaran. ▪ Efisiensi biaya. ▪ Manajemen <i>Cashflow</i>.
Risiko Pasar	▪ Perubahan permintaan pasar (tren/preferensi). ▪ Persaingan yang ketat.	▪ Diversifikasi Produk atau Layanan. ▪ Inovasi Produk & Layanan. ▪ Penggunaan teknologi baru.
Risiko Operasional	▪ Keterampilan dan kapasitas SDM (tenaga kerja) dapat mempengaruhi produksi dan pelayanan. ▪ Masalah produksi atau pasokan (Gangguan dalam rantai pasokan atau produksi).	▪ Memiliki asuransi bisnis, melindungi UMKM dari risiko seperti bencana alam, kerusakan properti, atau masalah hukum ▪ Perawatan rutin peralatan, perencanaan rantai pasokan, dan manajemen persediaan. ▪ Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan melalui sertifikasi kompetensi SDM.

Jenis Risiko	Risiko	Mitigasi Risiko
Risiko Manajemen	Kurangnya perencanaan dan manajemen usaha yang baik mengakibatkan pengeluaran yang tidak terkontrol dan peningkatan biaya.	- Manajemen keuangan yang baik, termasuk perencanaan anggaran dan pemantauan pengeluaran - Meningkatkan pendapatan.

b. Mengamankan sumber pendapatan UMKM

Mengamankan sumber pendapatan dan profitabilitas usaha dalam proyek UMKM merupakan langkah penting untuk kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi untuk keberlanjutan UMKM dalam mengamankan sumber pendapatan:

1) Memahami kebutuhan dan menjaga loyalitas Pelanggan

Memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan adalah kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan. Selalu terhubung dengan pelanggan dan mengumpulkan umpan balik untuk terus meningkatkan produk atau layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

2) Menetapkan harga yang tepat dan mengendalikan biaya

Menetapkan harga yang sesuai dengan nilai produk atau layanan, serta harga yang bersaing di pasar, penting untuk memastikan profitabilitas yang baik. Memantau dan mengendalikan biaya operasional adalah langkah kunci untuk memaksimalkan profitabilitas. Identifikasi di pos pengeluaran mana yang dapat ditekan/dioptimalkan untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas.



3) Inovasi produk dan manajemen persediaan barang

Usaha dampingan perlu secara *continue* mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk, menghadirkan inovasi baru untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang ada. Dalam meningkatkan kualitas produk, manajemen penyediaan dan penyimpanan produk harus dijaga dengan baik.

4. Alokasi Pendapatan Usaha, Pengelolaan *Cashflow* dan Alokasi Pembayaran Angsuran/Rencana Penyelesaian Pembiayaan UMKM Dampingan

a. Monitoring tingkat profitabilitas usaha dan atau proyek.

Monitoring tingkat profitabilitas usaha atau proyek adalah suatu proses penting dalam mengelola bisnis UMKM yang memungkinkan pemilik atau manajer untuk memahami dan mengukur kinerja keuangan mereka. Ini melibatkan pemantauan secara berkala terhadap sejauh mana bisnis atau proyek telah mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Monitoring profitabilitas dapat memberikan wawasan yang berharga yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis.

Proses monitoring profitabilitas usaha ini mencakup analisis pendapatan dan biaya, margin keuntungan, serta perbandingan antara proyeksi keuangan awal dan hasil yang sebenarnya. Dengan pemantauan yang baik, UMKM dapat mengidentifikasi tren positif atau negatif dalam profitabilitas dan segera mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Ini juga membantu dalam perencanaan anggaran, alokasi sumber daya, serta perubahan strategi bisnis yang mungkin diperlukan untuk mengoptimalkan profitabilitas dan kelangsungan usaha.

Selain itu, pemantauan profitabilitas yang cermat juga dapat membantu dalam menilai efektivitas kebijakan. Tindakan tertentu yang telah diambil

dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, seperti perubahan dalam pasar, perubahan biaya produksi, atau perubahan strategi pemasaran. Ini memungkinkan UMKM untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih efisien dan berkelanjutan.

b. Pengelolaan *Cashflow* Usaha.

Pengelolaan *cashflow* (arus kas) adalah aspek kunci dalam manajemen keuangan usaha, terutama untuk UMKM. *Cashflow* mengacu pada aliran masuk dan keluar uang tunai dalam bisnis Anda. Pengelolaan yang baik dari *cashflow* sangat penting untuk menjaga likuiditas dan kelangsungan usaha. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu dalam pengelolaan *cashflow* usaha UMKM dampingan:

1) Perencanaan Anggaran.

Buat anggaran yang terperinci dengan memperkirakan pemasukan dan pengeluaran usaha UMKM dampingan. Ini harus mencakup semua sumber pendapatan dan biaya yang mungkin, termasuk biaya tetap (sewa, gaji) dan biaya variabel (bahan baku, listrik).

2) Pemantauan.

Pemantauan *cashflow* harian untuk memahami aliran masuk dan keluar uang, sehingga masalah *cashflow* dapat diidentifikasi dan diantisipasi lebih awal.

3) Manajemen penagihan (piutang)

Kelola tagihan pelanggan dengan baik dan pastikan pembayaran tepat waktu. Di sisi utang, pertimbangkan strategi untuk membayar

utang dengan tepat waktu, efisien dan meminimalkan pembayaran hasil/margin/jasa kepada pihak pemberi pembiayaan.

4) Pendanaan Eksternal

Tidak seluruh kebutuhan usaha dapat didanai secara internal dengan memutar laba operasional maupun menambah modal dari pemilik usaha. Apabila diperlukan, opsi pendanaan eksternal seperti pembiayaan, maupun pendanaan/investasi yang dapat dipertimbangkan untuk membantu menangani kekurangan kas sementara.

5) Penyusutan Stok dan Persediaan

Stok/persediaan perlu dijaga dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar. Penumpukan stok/persediaan dalam jumlah besar bisa mengikis likuiditas usaha. Oleh karena itu, jumlah stok/persediaan ditingkatkan hanya saat ada permintaan yang besar dan terkonfirmasi.

6) Cicilan hutang yang dikelola dengan baik

Jika UMKM dampingan memiliki hutang kepada *supplier* maupun pihak lain, pastikan bahwa UMKM dampingan mampu mengelolanya dengan benar, menghindari penundaan pembayaran, dan memastikan pembayaran sesuai jadwal.

Pengelolaan *cashflow* yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa usaha UMKM dampingan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berkembang. Dengan pemantauan dan perencanaan yang baik, UMKM dampingan dapat mengelola risiko kekurangan kas dan mendukung pertumbuhan bisnisnya.

c. Pengalokasian dana angsuran pembiayaan

Penting memastikan bahwa usaha UMKM dampingan memiliki alokasi dana yang cukup untuk membayar angsuran angsuran. Ketidak cukupan pembayaran dapat menyebabkan masalah finansial yang serius, seperti penundaan pembayaran, penalti keterlambatan pembayaran, atau bahkan hingga penutupan usaha. Oleh karena itu, pemilik bisnis perlu mengintegrasikan pengalokasian dana angsuran pembiayaan ke dalam anggaran bisnis, memprioritaskan pembayaran angsuran sebagai komitmen utama, dan secara rutin memantau *cashflow* agar pembayaran dapat dipenuhi tepat waktu.

Selain itu, negosiasi dengan pemberi pembiayaan dapat menjadi pilihan jika bisnis mengalami kesulitan keuangan, dan restrukturisasi utang atau perpanjangan jangka waktu pembayaran adalah strategi yang dapat membantu menjaga likuiditas keuangan yang lebih baik. Dengan pengelolaan yang bijak, pengalokasian dana angsuran pembiayaan dapat membantu menjaga stabilitas keuangan bisnis dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang.

5. Risiko dan Dampak Penyalahgunaan (*side streaming*) Dana Pembiayaan UMKM

a. Risiko Operasional *Side Streaming*.

Salah satu resiko operasional yang sering terjadi adalah *side streaming* pada pembiayaan UMKM yaitu praktik pengalihan dana atau sumber pembiayaan yang semestinya dialokasikan untuk usaha ke kepentingan lain, seringkali yang tidak terkait dengan pertumbuhan UMKM. Salah satu risiko utama adalah alokasi dana yang tidak tepat. Ketika dana yang semestinya mendukung pertumbuhan UMKM dialokasikan ke proyek atau program lain, UMKM dapat kehilangan akses ke modal yang mereka

butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat menghambat perkembangan UMKM dan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar.

Selain itu, risiko *side streaming* dapat mengarah pada ketidaktransparanan dalam penggunaan dana yang diberikan kepada UMKM. Bila dana yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan UMKM dialokasikan ke kepentingan lain, transparansi dalam pengelolaan dana menjadi sulit untuk diawasi. Hal ini dapat menghasilkan praktik korupsi, penyalahgunaan dana, atau pemotongan dana yang seharusnya diterima oleh UMKM. Risiko ini dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan UMKM secara keseluruhan dan melemahkan kontribusi UMKM terhadap ekonomi lokal dan nasional. Oleh karena itu, penting untuk memitigasi risiko *side streaming* dan memastikan bahwa dana yang ditujukan untuk UMKM digunakan dengan cara yang benar dan efektif untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan (*Side Streaming*) Dana Pembiayaan.

Penyalahgunaan dana pembiayaan, atau yang dikenal sebagai *side streaming*, adalah praktik yang tidak etis atau ilegal di mana seseorang atau entitas menggunakan dana yang diberikan untuk tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang tidak sesuai. Beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan termasuk:

1) Kontrol Yang Lemah.

Ketika kontrol dan pengawasan yang tepat tidak diterapkan, maka terdapat risiko penyalahgunaan dana. Kurangnya pengawasan pemberi pembiayaan seperti lembaga keuangan syariah maupun

investor dapat memungkinkan orang untuk menyalahgunakan dana tanpa terdeteksi.

2) Ketidakjujuran Individu

Faktor psikologis seperti ketidakjujuran, kecurangan, atau keserakahan individu pemilik maupun penanggung jawab usaha dapat mendorong mereka untuk menyalahgunakan dana pembiayaan demi keuntungan pribadi.

3) Tekanan Keuangan

Disaat pemilik usaha atau bisnis UMKM menghadapi masalah keuangan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial, mereka mungkin merasa terdorong untuk menyalahgunakan dana pembiayaan sebagai cara untuk mengatasi masalah tersebut.

4) Ketidakmampuan atau Ketidackakapan Manajemen

Ketidakmampuan manajemen dalam mengelola dana pembiayaan dengan efektif dapat menyebabkan kekacauan dalam alokasi dan penggunaan dana, yang dapat menghasilkan penyalahgunaan.

5) Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi

Sistem yang kurang akuntabel dan tidak transparan dalam pengelolaan dana pembiayaan dapat menciptakan peluang bagi penyalahgunaan, karena tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif.

Untuk mencegah penyalahgunaan dana pembiayaan, penting untuk memiliki kontrol yang kuat, kebijakan dan prosedur yang jelas, pengawasan yang ketat, serta budaya etika yang kuat dalam organisasi. Selain itu, melibatkan audit eksternal dan pemantauan

independen juga dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana.

c. Jenis dan Bentuk Penyalahgunaan (*Side Streaming*) Dana Pembiayaan.

Penyalahgunaan dana pembiayaan (*side streaming*) beragam tergantung pada situasi dan pelaku yang terlibat. Jenis dan bentuk umum penyalahgunaan dana pembiayaan diantaranya:

- 1) Pencurian Dana. Ini melibatkan tindakan curang di mana seseorang atau entitas mengambil dana pembiayaan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan atau pengetahuan pihak yang memberikan pembiayaan.
- 2) Pembelian Barang Pribadi. Penggunaan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang pribadi seperti kendaraan, barang mewah, atau barang pribadi lainnya yang tidak terkait dengan tujuan asli pembiayaan.
- 3) Pembayaran Utang Pribadi. Pihak yang menerima dana pembiayaan dapat menggunakan dana tersebut untuk membayar utang pribadi mereka, yang seharusnya tidak terkait dengan pembiayaan.
- 4) Investasi atau Perdagangan Saham yang Salah. Dana pembiayaan dialokasikan untuk investasi saham atau perdagangan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Individu atau perusahaan mungkin mencoba memanfaatkan dana ini untuk keuntungan pribadi.
- 5) Pengeluaran yang Tidak Terkait Dana pembiayaan digunakan untuk pengeluaran yang tidak terkait dengan bisnis atau proyek yang dibiayai. Ini dapat mencakup perjalanan pribadi, makanan, hiburan, atau pengeluaran pribadi lainnya.

Untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan dana pembiayaan, perusahaan dan lembaga pembiayaan harus menerapkan kontrol yang

ketat, pengawasan yang efisien, dan audit internal yang berkala. Pemeriksaan keuangan independen dan penggunaan teknologi untuk pemantauan transaksi keuangan juga dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan.

d. Dampak *side streaming* terhadap bisnis UMKM.

Dampak *side streaming* terhadap bisnis UMKM dapat sangat merugikan. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan bisnis atau proyek khusus diarahkan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai, UMKM dapat menghadapi sejumlah konsekuensi yang signifikan, diantaranya:

- 1) **Risiko finansial.** *Side streaming* dapat mengganggu likuiditas usaha sehingga menyebabkan UMKM tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kondisi ini dapat mengganggu operasional sehari-hari dan mengakibatkan menurunnya kepercayaan dari pemberi pembiayaan, mitra bisnis, dan pelanggan. Terjadinya *side streaming* dapat mengakibatkan UMKM tidak mendapatkan pembiayaan tambahan yang diperlukan.
- 2) **Risiko reputasi.** *Side streaming* dapat merusak reputasi bisnis UMKM. Kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis dapat menghambat pertumbuhan bisnis, mengurangi kesempatan kerjasama masa depan, dan menimbulkan dampak juga pada citra merek. Dampak jangka panjang dari reputasi yang rusak mungkin sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, UMKM perlu sangat berhati-hati dalam mengelola dana pembiayaan dan memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan sesuai dengan tujuan awalnya. Penerapan praktik etika bisnis dan kontrol keuangan yang kuat sangat penting dalam menjaga kesehatan keuangan dan reputasi bisnis UMKM.

B. Mengukur Dampak/ Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha UMKM Dampingan.

1. Pemantauan Pembiayaan UMKM Dampingan

Pemantauan pengelolaan dana pembiayaan bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan efisien dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Aspek penting dalam pemantauan adalah (1) transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana serta; (2) efektivitas pengelolaan dan pemantauan pengelolaan. Pemantauan pembiayaan UMKM dapat dilakukan melalui:

a. Monitoring pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan UMKM dampingan.

Pembayaran angsuran tepat waktu akan memberikan manfaat sangat besar bagi UMKM, diantaranya adalah meningkatkan kepercayaan dari lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kembali kepada UMKM. Apabila UMKM melakukan pembayaran tidak tepat waktu bahkan gagal bayar, maka UMKM masuk dalam daftar hitam pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di OJK. Dampaknya selain menurunkan kredibilitas UMKM, menurunkan kepercayaan diri dan tidak memiliki ketenangan hidup karena ditagih terus menerus. Oleh karena itu, Pendamping harus melakukan monitoring pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan UMKM dampingan sehingga hal tersebut dapat dihindari. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan UMKM:

- 1) Pemantauan Manual. Metode yang paling sederhana adalah dengan melakukan pemantauan manual. Dilakukan secara berkala terhadap catatan pembayaran dan laporan yang disediakan oleh UMKM.

Pendamping membantu memonitoring sampai UMKM dapat melakukan pemantauan secara mandiri, diantaranya dengan menyediakan lembar kerja atau *worksheet* sederhana untuk mencatat pembayaran dan mengelola jadwal angsuran.

- 2) Pemantauan melalui sistem keuangan, biasanya dilakukan oleh Bank pemberi pembiayaan. Pendamping dan UMKM sendiri membiasakan diri pada system keuangan melihat jadwal waktu pembayaran.

Kombinasi dari kedua metode tersebut dapat memberikan pemantauan efektif dalam memastikan pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan UMKM yang tepat waktu.

b. Pemantauan kualitas pembiayaan UMKM dampingan.

Pemantauan kualitas pembiayaan UMKM dilakukan dengan pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), UMKM dapat meminta informasi pembiayaan atas nama penerima pembiayaan yang bersangkutan kepada OJK atau kepada Lembaga Keuangan Pelapor SLIK yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada UMKM yang bersangkutan. Permintaan Informasi Debitur kepada OJK dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu:

- 1) Luring/Offline/Walk-In
 - a. Pemohon SLIK hadir secara fisik ke kantor OJK setempat.
 - b. Membawa dokumen persyaratan permohonan Informasi Debitur SLIK sebagaimana terlampir.
 - c. Hasil SLIK akan dikirimkan melalui email pemohon yang telah didaftarkan di OJK.
- 2) Daring/Online
 - a. Pemohon SLIK mengajukan permohonan Informasi Debitur melalui aplikasi iDebku OJK pada laman: <https://idebku.ojk.go.id>

- b. Pemohon mengisi data registrasi secara lengkap dan benar, upload dokumen identitas (KTP) dan Foto Diri sesuai yang diminta.
- c. Setelah pendaftaran berhasil, Pemohon akan menerima email yang berisi nomor pendaftaran dari OJK.
- d. Pemohon dapat mengecek status permohonan dengan memasukkan nomor pendaftaran pada menu "Status Layanan".
- e. OJK akan memproses dan mengirimkan permohonan iDeb melalui email Pemohon maksimal 1 hari kerja setelah Pendaftaran dilakukan.

Pemantauan kualitas pembiayaan UMKM penting untuk dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah keuangan UMKM sejak dini.

- c. Pengaruh Kualitas Pembiayaan Terhadap Akses Pembiayaan UMKM Dampingan.

Kualitas pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM, menjaga kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan dapat menjaga kepercayaan lembaga keuangan, riwayat pembiayaan yang lancar/baik akan memudahkan UMKM untuk mengakses/mendapatkan tambahan pembiayaan di kemudian hari. Beberapa pengaruh kualitas pembiayaan terhadap akses pembiayaan UMKM di antaranya adalah:

- 1) Kemudahan akses. Kualitas pembiayaan yang baik (kolektibilitas lancar, membayar kewajiban tepat waktu dan tidak pernah menunggak), akan mempermudah akses pembiayaan UMKM. UMKM memiliki keleluasaan dalam memilih alternatif sumber dan skema pembiayaan. Lembaga Keuangan memiliki persepsi risiko yang lebih

rendah terhadap UMKM yang memiliki riwayat kualitas pembiayaan yang baik. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pengajuan pembiayaan yang relative lebih cepat, probabilitas untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan lebih tinggi dan persyaratan pembiayaan yang lebih ringan.

- 2) Besaran bagi hasil, margin atau ujroh pembiayaan yang dikenakan. Bagi Lembaga Keuangan, risiko pembiayaan akan berpengaruh terhadap besaran bagi hasil, margin atau ujroh yang akan dikenakan terhadap pembiayaan tersebut. Semakin besar risiko pembiayaan, lembaga keuangan akan mengkompensasinya dengan mengenakan margin/bagi hasil/ujrah yang lebih besar. Salah satu faktor yang dapat menurunkan risiko pembiayaan adalah adanya histori pembiayaan dengan kualitas yang baik. Dengan demikian, kualitas pembiayaan yang baik akan meningkatkan probabilitas UMKM untuk mendapatkan bagi hasil/margin/ujroh.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang berkualitas akan menciptakan lingkaran positif dengan mengurangi risiko bagi pemberi pembiayaan dan membangun kepercayaan antara UMKM dan pemberi pembiayaan. Hal ini juga dapat menarik minat investor dan mendukung pertumbuhan bisnis UMKM secara berkelanjutan.

2. Dampak Pembiayaan Terhadap Kinerja Bisnis dan Keuangan UMKM Dampingan

Pembiayaan yang tepat dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis UMKM. Dengan bantuan pembiayaan, UMKM dampingan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan mengembangkan produk atau layanan. Dampak pembiayaan terhadap bisnis UMKM dapat dievaluasi dari kenaikan

pendapatan, peningkatan keuntungan bersih, dan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat distribusikan langsung kepada pembiayaan. Selain itu, analisis juga harus memperhitungkan dampak jangka panjang, seperti peningkatan daya saing, akses ke pasar baru, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang.

Namun, analisis dampak juga harus mempertimbangkan risiko dan tantangan yang mungkin muncul seiring dengan pembiayaan, seperti pembayaran utang atau pengelolaan risiko usaha. Evaluasi yang komprehensif harus mempertimbangkan berbagai indikator kinerja dan keuangan, serta memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan yang berkaitan. Kesimpulan dari analisis ini dapat memberikan panduan berharga bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program pembiayaan UMKM dampingan, membantu mereka memutuskan apakah perlu diperluas, disesuaikan, atau dihentikan, serta membantu UMKM meningkatkan daya saing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

a. Indikator/aspek pengukuran.

Indikator dampak pembiayaan terhadap kinerja bisnis dan keuangan UMKM paling tidak meliputi beberapa hal berikut:

- 1) Perubahan Omzet.
- 2) Perubahan Asset.
- 3) Perubahan Rasio Keuangan.

Beberapa rasio keuangan yang digunakan diantaranya sbb:

- Current Ratio
- Profitabilitas.
- Solvabilitas.

3. Perubahan Tata Kelola/Manajemen (*Governance*) & Pengendalian Risiko Usaha

Pertumbuhan penjualan produk atau layanan merupakan indikator penting untuk menilai efek positif pembiayaan terhadap ekspansi usaha UMKM. Indikator lain adalah perubahannya tata kelola/manajemen usaha termasuk jumlah pekerja/karyawan yang diciptakan atau dipertahankan oleh UMKM.

Tingkat keberlanjutan, jika pembiayaan digunakan untuk proyek yang berkelanjutan, seperti inisiatif lingkungan, maka dampak/pengaruh pada keberlanjutan dapat diukur melalui indikator seperti pengurangan limbah atau penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Efisiensi penggunaan dana pembiayaan, memantau perkembangan UMKM, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian dalam strategi penggunaan dana pembiayaan.

a. Metode pengukuran.

Pengukuran dampak pembiayaan pada UMKM menggunakan berbagai metode untuk menilai sejauh mana pembiayaan tersebut mempengaruhi kinerja dan keuangan UMKM dengan membandingkan dari data sebelum pembiayaan terhadap hasil. Berikut dibawah ini metode umum yang dapat digunakan untuk mengukur dampak pembiayaan yaitu Analisis Keuangan, hal ini mencakup penilaian laporan keuangan UMKM sebelum dan setelah pembiayaan, perbandingan perubahan kinerja keuangan dapat dilihat dari:

- 1) Perubahan Omzet dapat buat table perbandingan sebelum dan setelah penampungan, data dapat dilihat pada laporan laba/rugi.
- 2) Perubahan Asset dapat buat table perbandingan sebelum dan setelah penampungan, data dapat dilihat pada laporan Neraca.

- 3) Perubahan rasio keuangan (*Current Ratio*, Profitabilitas dan Solvabilitas). dapat buat table perbandingan sebelum dan setelah pendampingan, data dapat dilihat pada laporan Rugi/laba dan Neraca.
- b. Analisa dampak pembiayaan terhadap kinerja bisnis dan kinerja keuangan.

Analisis dampak pembiayaan terhadap kinerja bisnis dan kesehatan keuangan merupakan pendekatan penting untuk mengevaluasi apakah pembiayaan yang diberikan telah memberikan manfaat yang signifikan bagi usaha atau organisasi. Dalam analisis ini, akan diperhatikan dampak pembiayaan pada dua aspek utama, yaitu kinerja bisnis dan kesehatan keuangan:

- 1) Kinerja Bisnis:

- a) Pendapatan dan laba.

Pembiayaan yang berhasil biasanya akan tercermin dalam peningkatan pendapatan dan laba bersih usaha. Analisis dapat membandingkan angka-angka ini sebelum dan setelah pembiayaan untuk menilai dampaknya.

- b) Pertumbuhan penjualan.

Pertumbuhan penjualan produk atau layanan adalah indikator utama yang mencerminkan kesuksesan dalam ekspansi bisnis. Dampak pembiayaan dapat diukur dengan membandingkan penjualan sebelum dan sesudah pembiayaan.

- 2) Kinerja Keuangan:

- a) Perubahan dalam rasio keuangan.

Analisis mencakup perubahan dalam rasio keuangan kunci, seperti rasio utang terhadap ekuitas, rasio keuntungan bersih terhadap pendapatan, dan rasio arus kas terhadap utang.

b) Pengurangan risiko keuangan.

Pembiayaan dapat membantu mengurangi risiko keuangan dengan meningkatkan likuiditas atau memberikan dana untuk mengatasi krisis keuangan.

c) Efisiensi operasional.

Dampak pembiayaan pada efisiensi operasional dapat dianalisis melalui perbandingan biaya operasional sebelum dan setelah pembiayaan.

Analisis dampak tersebut juga harus mempertimbangkan faktor kontekstual, seperti risiko yang terkait dengan pembiayaan, latar belakang ekonomi, dan tren industri. Selain itu, metode pengukuran dan pemantauan yang berkelanjutan akan membantu menjaga kinerja bisnis dan kesehatan keuangan tetap pada jalur yang benar.

c. Interpretasi hasil analisa

Interpretasi hasil analisis dampak pembiayaan terhadap kinerja bisnis dan kesehatan keuangan dilakukan untuk memahami implikasinya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga *repayment capacity* untuk kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan dan keberlanjutan usaha. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat membantu dalam interpretasi hasil analisis:

1) Peningkatan pendapatan.

Jika hasil analisis menunjukkan peningkatan pendapatan setelah pembiayaan, ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda positif. Peningkatan pendapatan bisa mengindikasikan bahwa pembiayaan telah berhasil dalam meningkatkan penjualan produk atau layanan, yang pada gilirannya bisa berdampak positif pada pertumbuhan bisnis.

2) Kesehatan keuangan

Kesehatan keuangan yang meningkat menunjukkan perbaikan dalam rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas yang lebih rendah atau rasio keuntungan bersih terhadap pendapatan yang lebih tinggi, ini bisa diartikan sebagai pertanda baik. Ini menandakan bahwa pembiayaan telah membantu meningkatkan kesehatan keuangan usaha.

3) Efisiensi Operasional yang Meningkat.

Jika analisis mengungkapkan bahwa pembiayaan telah meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya, ini bisa diartikan sebagai tanda positif yang menunjukkan manajemen yang baik dalam pengelolaan sumber daya.

4) Risiko Keuangan yang Berkurang.

Jika pembiayaan telah membantu mengurangi risiko keuangan, ini bisa diinterpretasikan sebagai perlindungan terhadap potensi masalah keuangan di masa depan. Penting untuk diingat bahwa hasil analisis dilihat dalam konteks tujuan awal pembiayaan dan strategi bisnis secara keseluruhan. Selain itu, hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di masa depan, seperti apakah perlu diperluas, disesuaikan, atau dihentikan pembiayaan. Interpretasi yang cermat dan komprehensif akan membantu

pemangku kepentingan membuat keputusan yang tepat guna mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.

C. Mengevaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan

Evaluasi pengelolaan dana pembiayaan adalah tahap kritis dalam memastikan bahwa dana yang disalurkan kepada penerima pembiayaan, seperti UMKM, digunakan secara efektif dan berdampak positif. Selama evaluasi, berbagai aspek dan tindakan pengelolaan dana dievaluasi untuk memahami sejauh mana dana telah dimanfaatkan dengan baik dan apakah tujuan pembiayaan telah tercapai. Ini melibatkan analisis data keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, dan wawancara dengan pemilik atau manajemen usaha. Selain itu, evaluasi juga dapat memperhatikan apakah penerima pembiayaan telah mematuhi persyaratan pembiayaan, termasuk pembayaran tepat waktu jika ada utang yang terlibat.

Hasil evaluasi pengelolaan dana pembiayaan dapat memberikan wawasan berharga kepada pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Evaluasi yang positif menunjukkan bahwa dana telah dikelola dengan baik, berkontribusi pada pertumbuhan bisnis, dan menciptakan dampak yang diinginkan. Sementara itu, evaluasi yang kurang positif dapat mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan dana dan memungkinkan pihak terkait untuk mengambil tindakan perbaikan, seperti memberikan bimbingan tambahan atau penyesuaian dalam perencanaan keuangan. Dalam semua kasus, evaluasi pengelolaan dana pembiayaan adalah alat penting untuk memaksimalkan hasil investasi dan menjaga kesehatan keuangan usaha.

1. Ruang Lingkup, Aspek, Metode dan Tahapan Evaluasi Pendampingan
 - a. Untuk Mengevaluasi Ruang Lingkup Pendampingan Pengelolaan Dana Pembiayaan Dapat Mencakup Berbagai Aspek, seperti:

- 1) Perencanaan keuangan adalah merencanakan keuangan, termasuk pembuatan anggaran, proyeksi keuangan, dan pengembangan rencana bisnis yang inklusif
- 2) Manajemen arus kas, yaitu pendampingan dalam mengelola aliran kas harian, pengeluaran, dan penerimaan dana untuk memastikan likuiditas dan ketersediaan dana yang cukup untuk operasi sehari-hari.
- 3) Manajemen dana membantu dalam menentukan alokasi dana yang tepat untuk berbagai keperluan, seperti investasi dalam modal kerja, pengembangan produk, atau ekspansi usaha.
- 4) Pelaporan keuangan, yaitu membantu dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, yang dapat digunakan untuk melaporkan kepada pihak pembiayaan atau investor.

b. Aspek, Metode Dan Tahapan Evaluasi Pendampingan.

Evaluasi pendampingan dapat mencakup berbagai aspek, metode, dan tahapan. Berikut adalah rincian lebih lanjut:

- 1) Aspek Evaluasi Pendampingan:
 - a) Efektivitas Pendampingan: Menilai sejauh mana pendampingan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini mencakup apakah pendampingan telah membantu individu atau organisasi dalam mencapai perubahan yang diinginkan.
 - b) Kualitas Pendampingan: Mengukur kualitas layanan pendampingan, termasuk kemampuan pendamping, kualitas interaksi, dan relevansi saran atau bimbingan.
 - c) Pengaruh Pendampingan: Menganalisis dampak pendampingan pada perkembangan, peningkatan kompetensi, atau perubahan perilaku individu atau organisasi yang mendapat pendampingan.
 - d) Kepuasan UMKM: Melibatkan evaluasi tingkat kepuasan peserta terhadap layanan pendampingan yang diberikan.

2) Metode Evaluasi Pendampingan:

- a) Survei dan Kuesioner: Menggunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari peserta pendampingan atau klien. Ini mencakup pertanyaan tentang efektivitas, kepuasan, dan perubahan yang dialami peserta.
- b) Wawancara: Melibatkan wawancara dengan peserta atau klien untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman mereka dengan pendampingan.
- c) Pemantauan dan Pengukuran Kinerja: Melibatkan pengumpulan data kuantitatif yang relevan, seperti perbandingan hasil sebelum dan setelah pendampingan, untuk mengukur dampaknya.
- d) Studi Kasus: Menggunakan studi kasus untuk menggali cerita sukses atau perubahan yang terjadi pada individu atau organisasi yang mendapat pendampingan.

3) Tahapan Evaluasi Pendampingan:

- a) Perencanaan Evaluasi: Tahapan awal yang melibatkan perencanaan tujuan, metodologi, dan pengumpulan data yang akan digunakan dalam evaluasi.
- b) Pengumpulan Data: Melibatkan pengumpulan data sesuai dengan metodologi yang telah direncanakan, baik melalui survei, wawancara, pemantauan, atau metode lain.
- c) Analisis Data: Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi efektivitas, kualitas, dan dampak pendampingan.
- d) Interpretasi Hasil: Menginterpretasikan hasil evaluasi untuk memahami implikasi dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Penting untuk diingat bahwa evaluasi pendampingan adalah alat yang penting untuk mengukur efektivitas dan memperbaiki layanan

pendampingan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa pendampingan memberikan dampak positif kepada mereka yang menerimanya.

2. Persiapan Peralatan Bahan Evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi pendampingan pengelolaan dana pembiayaan dan pengukuran dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM dampingan perlu dilakukan persiapan yang matang dengan tujuan membantu memastikan bahwa proses evaluasi berjalan lancar dan memberikan hasil yang informatif. Beberapa peralatan dan bahan yang dapat Anda siapkan:

a. Instrumen evaluasi

Persiapkan instrumen atau alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi, seperti survei, kuesioner, atau panduan wawancara. Pastikan instrumen tersebut telah dirancang dengan baik dan sesuai dengan tujuan evaluasi.

b. Perangkat lunak atau aplikasi

Jika menggunakan perangkat lunak atau aplikasi untuk mengelola data evaluasi, pastikan perangkat tersebut telah diunduh dan diatur dengan benar. Ini dapat termasuk spreadsheet (seperti Excel), perangkat lunak survei online, atau aplikasi khusus evaluasi.

c. Dokumen panduan

Sediakan panduan atau petunjuk untuk para penilai atau pendamping yang terlibat dalam proses evaluasi. Panduan ini dapat berisi instruksi

mengenai cara mengumpulkan data, batasan etika, dan penggunaan instrumen evaluasi.

d. Perangkat keras

Pastikan memiliki perangkat keras yang diperlukan, seperti komputer, ponsel cerdas, atau peralatan rekaman, untuk memproses dan menyimpan data evaluasi.

e. Materi pendukung

Siapkan materi pendukung yang relevan dengan evaluasi, seperti catatan pertemuan, laporan perkembangan, atau dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan dalam proses evaluasi.

f. Perangkat Perekaman (jika diperlukan):

Jika evaluasi melibatkan perekaman audio atau video, pastikan memiliki perangkat dan peralatan perekaman yang diperlukan, seperti perekam suara atau kamera.

g. Kertas Kerja Evaluasi:

Persiapkan formulir atau kertas kerja evaluasi yang akan digunakan selama proses evaluasi untuk mencatat data dan temuan.

Pastikan untuk menyusun peralatan dan bahan evaluasi dengan baik sebelum memulai proses evaluasi. Hal ini akan membantu menghindari hambatan atau masalah teknis selama evaluasi dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan berkualitas tinggi.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi adalah tahap kunci dalam proses evaluasi yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pengamatan. Evaluasi melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penilaian yang obyektif, serta pengambilan keputusan berdasarkan temuan yang ditemukan. Evaluasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, diantaranya:

- Mengukur Kinerja.

Evaluasi dapat membantu dalam menilai sejauh mana suatu program atau proyek telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini dapat mencakup pengukuran berbagai indikator kinerja, seperti pencapaian target, efisiensi penggunaan sumber daya, dan produktivitas.

- Mengukur Dampak.

Evaluasi dapat membantu dalam menilai dampak positif atau negatif yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau inisiatif. Ini melibatkan penilaian terhadap perubahan nyata atau potensial dalam masyarakat, lingkungan, atau kelompok yang terlibat.

- Perbaikan dan Pengambilan Keputusan.

Evaluasi dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait perubahan program, alokasi sumber daya, atau arah kebijakan selanjutnya. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk merancang perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.

- Akuntabilitas:

Evaluasi dapat membantu dalam menjawab pertanyaan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk donor, pemerintah, atau publik, tentang bagaimana sumber daya telah digunakan dan apakah program atau proyek telah memenuhi tujuannya.

- Pembelajaran Organisasi.

Evaluasi dapat menjadi alat pembelajaran organisasi yang penting. Dengan mengevaluasi pengalaman masa lalu, organisasi dapat mengidentifikasi pelajaran yang berharga untuk diterapkan di masa depan.

Evaluasi dapat menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk survei, wawancara, pengamatan, analisis data, dan analisis statistik, tergantung pada sifat program atau proyek yang dievaluasi serta tujuan evaluasi tersebut. Hasil evaluasi biasanya dirangkum dalam laporan evaluasi yang berisi temuan, rekomendasi, dan kesimpulan untuk informasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut.

a. Persiapan Evaluasi:

1) Desain Evaluasi.

Pada tahap ini, perlu dirancang bagaimana proses evaluasi akan dilakukan, termasuk metode dan perangkat yang akan digunakan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah:

- a) Tujuan dan Sasaran: Tentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan program atau kegiatan. Hal ini akan menjadi landasan untuk proses evaluasi selanjutnya.
- b) Indikator Kinerja: Tentukan indikator kinerja yang dapat diukur dan menunjukkan apakah program mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- c) Sumber Data: Identifikasi sumber data yang diperlukan untuk mengukur indikator kinerja. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, data sekunder, dan lain-lain.
- d) Metode Pengumpulan Data: Pilih metode pengumpulan data yang tepat, seperti survei, observasi, wawancara, atau kombinasi dari beberapa metode.



- e) Kerangka Waktu: Tetapkan jadwal waktu untuk pelaksanaan evaluasi, termasuk frekuensi pemantauan dan evaluasi.

2) Alat dan Bahan.

Setelah merancang evaluasi, selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Misalnya:

- a) Kuesioner: Jika survei diperlukan, buat kuesioner yang relevan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- b) Panduan Wawancara: Jika ada wawancara, persiapkan panduan wawancara yang akan membantu dalam mengumpulkan data yang relevan dan konsisten.
- c) Checklist Observasi: Jika observasi digunakan, buatlah checklist untuk mencatat informasi yang relevan selama proses observasi.

3) Rencana Waktu Pelaksanaan.

Buatlah rencana waktu yang jelas untuk pelaksanaan evaluasi. Tentukan kapan pemantauan akan dilakukan, berapa kali evaluasi akan dilakukan, serta kapan dan bagaimana laporan hasil akan disusun dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

b. Pelaksanaan Evaluasi:

Setelah persiapan selesai, langkah selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi meliputi:

- 1) Pengumpulan Data: Lakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah dirancang sebelumnya, seperti survei, wawancara, atau observasi.

- 2) Pengolahan Data: Setelah data terkumpul, lakukan pengolahan data untuk mengubahnya menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami.
- 3) Analisis Data: Lakukan analisis data untuk mengevaluasi kinerja program, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menarik kesimpulan yang relevan.
- 4) Interpretasi Hasil: Setelah analisis selesai, interpretasikan hasil evaluasi dengan membandingkannya dengan tujuan dan sasaran awal program. Identifikasi apakah program mencapai hasil yang diharapkan dan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan evaluasi akan menjadi dasar untuk analisis dan interpretasi dalam tahap berikutnya, dan hasilnya akan digunakan untuk membuat keputusan atau rekomendasi yang relevan.

c. Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa evaluasi pendampingan mengukur efektifitas dari tujuan pendampingan itu sendiri. Pada pelaksanaan evaluasi dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Identifikasi tujuan evaluasi, yaitu memulai dengan memahami tujuan evaluasi. Apa yang ingin Anda capai dengan evaluasi ini? Apakah itu untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, atau mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data yang relevan terkait dengan proses atau program yang dievaluasi. Ini dapat melibatkan survei, wawancara, analisis dokumen, atau pemantauan lapangan, tergantung pada sifat evaluasi.



- 3) Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah, tren, atau pola yang muncul. Ini dapat melibatkan penggunaan metode analisis statistik atau teknik lainnya.
- 4) Menginterpretasikan hasil evaluasi dengan memahami implikasi dari temuan-temuan tersebut. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang tidak, serta apa yang mungkin menjadi penyebab masalah.

d. Rekomendasi Perbaikan.

Rekomendasi dan perbaikan yang diusulkan harus selalu disesuaikan dengan konteks, masalah, dan tujuan evaluasi yang spesifik. Selain itu, perencanaan dan implementasi rekomendasi harus mempertimbangkan sumber daya, anggaran, dan prioritas yang ada. Beberapa rekomendasi umum untuk perbaikan pengelolaan dana pembiayaan UMKM:

- 1) Skala prioritas merekomendasi mana yang paling penting untuk diterapkan terlebih dahulu. Prioritaskan masalah berdasarkan dampak dan urgensi.
- 2) Buat rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk memperbaiki masalah yang diidentifikasi. Pastikan rencana tindakan tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART).
- 3) UMKM sebaiknya menyusun rencana penggunaan dana pembiayaan yang jelas dan terperinci. Rencana ini harus mencakup alokasi dana untuk keperluan yang spesifik seperti pembelian inventaris, pembayaran utang, pengembangan produk, atau perluasan usaha.
- 4) Pemantauan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu, dimana UMKM menjaga pemantauan yang ketat terhadap penggunaan dana pembiayaan dan menyajikan laporan keuangan secara teratur. Ini membantu dalam menilai apakah dana digunakan sesuai rencana dan

membantu dalam mendeteksi masalah sebelum mereka menjadi besar.

- 5) Kompetensi SDM menjadi hal penting buat keberlanjutan usaha, oleh karena itu lakukan rekomendasi peningkatan SDM melalui pelatihan kepada pemilik atau tim manajemen UMKM tentang manajemen keuangan yang baik dapat membantu meningkatkan pengelolaan dana pembiayaan.
- 6) Pemantauan Kinerja Keuangan, UMKM perlu memantau indikator kinerja keuangan seperti ROI (*Return on Investment*), rasio laba bersih, dan rasio utang terhadap ekuitas untuk memastikan bahwa dana pembiayaan memberikan hasil yang diinginkan.

Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan UMKM digunakan dengan bijak, memberikan hasil yang diinginkan, dan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Setiap rekomendasi harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan khusus UMKM yang dievaluasi.

e. Evaluasi Pengukuran Dampak/Pengaruh

Evaluasi pengukuran dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM bertujuan untuk memahami apakah pembiayaan yang diberikan telah memberikan manfaat yang diharapkan.

- 1) Evaluasi penggunaan dana pembiayaan untuk memastikan bahwa dana tersebut telah digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan awal. Jika ada penyimpangan, evaluasi dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola dana.
- 2) Evaluasi dapat mengungkapkan masalah keuangan yang perlu diperbaiki, seperti rendahnya margin keuntungan, masalah

pengelolaan utang, atau perubahan dalam arus kas. Rekomendasi dapat mencakup perbaikan dalam manajemen keuangan UMKM.

- 3) Evaluasi dampak pembiayaan pada pertumbuhan bisnis, seperti peningkatan pendapatan, ekspansi usaha, atau peningkatan kapasitas produksi. Rekomendasi dapat mencakup strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan.
- 4) Evaluasi dapat mengukur dampak sosial atau lingkungan dari bisnis UMKM. Rekomendasi dapat mencakup perbaikan dalam praktik-praktik yang berkelanjutan atau sosial yang diterapkan oleh UMKM.
- 5) Dari hasil evaluasi, pendamping memberikan rekomendasi perbaikan yaitu tindakan atau langkah-langkah yang diusulkan untuk memperbaiki suatu situasi, proses, atau kondisi yang telah dievaluasi dan ditemukan memiliki kelemahan, masalah, atau peluang untuk peningkatan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan hasil evaluasi dan bertujuan untuk memberikan solusi konkret, strategis, dan terukur yang dapat membantu mencapai tujuan yang lebih baik, meningkatkan kinerja, dan mengoptimalkan hasil dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, organisasi, dan program.

4. Penyusunan Laporan Evaluasi Aktivitas Pendampingan

Laporan hasil pendampingan akses pembiayaan disusun setelah melakukan pendampingan atau pengawalan dalam proses akses pembiayaan ke lembaga keuangan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil dari proses pendampingan dan evaluasi atas proses melakukan akses pembiayaan ke lembaga keuangan.

Pengantar laporan hasil pendampingan adalah bagian dari laporan yang berfungsi untuk memberikan gambaran singkat tentang tujuan, konteks, dan metodologi pendampingan yang dilakukan sebelum menyajikan hasil utama

dari pendampingan tersebut. Penjelasan ini sering kali diletakkan di bagian awal laporan, tepat sebelum menyajikan temuan dan analisis yang lebih rinci. Berikut adalah komponen penting yang harus ada dalam pengantar laporan hasil pendampingan:

- a) Tujuan Pendampingan, jelaskan secara ringkas tujuan dari kegiatan pendampingan yang dilakukan. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang ingin dipecahkan melalui pendampingan.
- b) Konteks, sampaikan informasi mengenai konteks atau latar belakang pendampingan. Jelaskan mengapa pendampingan ini diperlukan, dan identifikasi isu atau masalah yang ingin diatasi.
- c) Metodologi, jelaskan pendekatan dan metode yang digunakan selama proses pendampingan. Ini termasuk metode pengumpulan data, analisis, serta teknik atau alat yang digunakan untuk membantu pemahaman dan pengambilan keputusan.
- d) Ruang Lingkup, tetapkan batasan dan ruang lingkup pendampingan. Sampaikan apa yang termasuk dalam cakupan pendampingan dan apa yang tidak.
- e) Pihak yang Terlibat: Sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan ini, baik secara aktif maupun sebagai penerima manfaat. Termasuk di antaranya bisa menjadi klien, tim pendamping, mitra, atau kelompok yang menjadi sasaran pendampingan.
- f) Waktu Pelaksanaan: Jelaskan kapan pendampingan ini dilakukan, dari awal hingga akhir. Informasi ini penting agar pembaca dapat memahami kerangka waktu yang digunakan untuk mencapai hasil.
- g) Sumber Daya: Jika relevan, cantumkan sumber daya yang digunakan selama pendampingan, seperti anggaran, personel, atau peralatan khusus.

- h) Struktur Laporan: Berikan ikhtisar tentang struktur laporan, yaitu bagaimana laporan ini akan disusun dan apa yang bisa diharapkan oleh pembaca dari setiap bagian laporan.
- i) Pengantar laporan harus ditulis dengan jelas, singkat, dan informatif. Ini akan membantu pembaca untuk memiliki pemahaman awal tentang apa yang akan disajikan dalam laporan. Selain itu, pastikan untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens yang dituju dan sertakan kata penghubung yang logis agar informasi tersampaikan dengan baik. Berikut susunan laporan hasil pendampingan akses pembiayaan.

BAB I Pendahuluan

- Menjelaskan pengantar atau latar belakang dan tujuan dari laporan evaluasi.
- Menyajikan ringkasan kegiatan pendampingan yang dilakukan selama periode evaluasi.

BAB II Analisis Kinerja Investasi.

- Tinjauan singkat mengenai portofolio pembiayaan yang sedang dikelola.
- Evaluasi kinerja pembiayaan berdasarkan metrik keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Penilaian tingkat pertumbuhan pembiayaan dan perbandingan dengan benchmark industri.

BAB III Dampak Pembiayaan terhadap Kinerja Bisnis.

- Analisis dampak pembiayaan terhadap berbagai aspek bisnis, termasuk peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, dan pangsa pasar.
- Evaluasi perkembangan produk atau layanan baru dan dampaknya terhadap strategi bisnis.

BAB IV Evaluasi Risiko dan Manajemen Risiko.

- Penilaian risiko yang terkait dengan pendampingan pembiayaan dan dampaknya terhadap kinerja bisnis.
- Evaluasi efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan selama periode evaluasi.

BAB V Analisis Keuangan dan Kesehatan Bisnis.

- Tinjauan laporan keuangan terkini dan perbandingan dengan periode sebelumnya.
- Evaluasi perubahan dalam rasio keuangan utama dan dampaknya terhadap struktur modal perusahaan.

BAB VI Rekomendasi Perbaikan dan Tindakan Selanjutnya.

- Sugesti rekomendasi spesifik berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.
- Rencana tindakan perbaikan yang terukur dan jadwal implementasi yang direkomendasikan.

BAB VIII Kesimpulan.

- Menyajikan kesimpulan utama dari evaluasi yang telah dilakukan.
- Menyediakan ringkasan singkat tentang dampak pendampingan pembiayaan terhadap pertumbuhan dan kesehatan bisnis.

Lampiran

- Lampiran yang berisi data pendukung, grafik, atau laporan keuangan yang relevan

D. Evaluasi Pengetahuan

FORMAT PILIHAN GANDA

EVALUASI PENGETAHUAN PILIHAN GANDA

Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal	:	

*Coret yang tidak perlu

Unit Kompetensi	Kode Unit	:	-
	Judul Unit	:	Melakukan Pendampingan Pengelolaan Dana Pembiayaan UMKM

Jawablah semua pertanyaan berikut:

1. Surat penawaran merujuk pada dokumen resmi yang digunakan oleh pihak yang memberikan pembiayaan atau pembiayaan kepada UMKM disebut?
 - a. Perjanjian pembiayaan.
 - b. Jadwal angsuran.
 - c. *Offering letter*.
 - d. Perjanjian pengikatan agunan.
2. Salah satu langkah identifikasi pembiayaan yang diterima UMKM dampingan adalah tujuan pembiayaan, berikut adalah beberapa tujuan pembiayaan usaha kecuali:
 - a. Modal Usaha.
 - b. Pembelian Peralatan Rumah Tangga.
 - c. Pengembangan Bisnis.
 - d. Pembelian mesin dan alat produksi

3. Alokasi dana pembiayaan usaha UMKM bertujuan untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan usaha UMKM agar kelangsungan dan pertumbuhan usaha dapat meningkat. Maka perlu bagi pendamping melakukan langkah-langkah strategis bersama sama dengan UMKM melalui tahapan berikut, kecuali:
 - a. Pemisahan pengelolaan keuangan usaha dan Pribadi pemilik usaha.
 - b. Tidak Melampaui Kemampuan Pembayaran.
 - c. Prioritaskan Kebutuhan Keluarga.
 - d. Identifikasi Kebutuhan Keuangan.
4. Berikut adalah aspek yang tidak menggambarkan situasi atau keadaan usaha UMKM tersebut beroperasi, berkembang, dan berkinerja.
 - a. Aspek keuangan.
 - b. Aspek fasilitas gedung.
 - c. Aspek operasional.
 - d. Aspek pemasaran.
5. Fluktuasi pendapatan/perubahan musiman atau fluktuasi dalam pendapatan dapat mempengaruhi kemampuan UMKM untuk membiayai proyek, kondisi ini termasuk kedalam resiko.
 - a. Resiko Pasar.
 - b. Resiko Operasional.
 - c. Resiko Keuangan.
 - d. Resiko Manajemen.

LEMBAR JAWABAN

EVALUASI PENGETAHUAN - PILIHAN GANDA

Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal	:	

*Coret yang tidak perlu

Unit Kompetensi	Kode Unit	:	
	Judul Unit	:	Melakukan Pengelolaan Dana Pembiayaan UMKM

Lembar Jawaban Pertanyaan Tertulis – Pilihan Ganda:

No.	Jawaban	Rekomendasi	
		K	BK
1.	A B C D	☐	☐
2.	A B C D	☐	☐
3.	A B C D	☐	☐
4.	A B C D	☐	☐
5.	A B C D	☐	☐

Nama	Peserta:	Instruktur:
Tanda Tangan dan Tanggal		

KUNCI JAWABAN

EVALUASI PENGETAHUAN - PILIHAN GANDA

Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal	:	

*Coret yang tidak perlu

Unit Kompetensi	Kode Unit	:	
	Judul Unit	:	Melakukan Pengelolaan Dana Pembiayaan UMKM

Kunci Jawaban Pertanyaan Tertulis – Pilihan Ganda:

No.	Jawaban
1.	C
2.	B
3.	C
4.	B
5.	C



Pentingnya
Pendampingan terkait
pengelolaan keuangan
usaha dengan baik;
pemisahan keuangan
pribadi dengan & usaha,
pengelolaan *cashflow* &
alokasi pembayaran
angsuran/pelunasan



LAMPIRAN

1. Daftar Istilah

1.	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban dan kejelasan atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder
2.	Audit eksternal	Pemeriksaan independen atas laporan keuangan suatu entitas oleh pihak luar.
3.	Audit internal	Pemeriksaan atas proses bisnis dan sistem kontrol internal suatu entitas oleh tim internal atau departemen audit.
4.	<i>Blended</i>	Pelatihan dengan pertemuan campuran atau kombinasi antara Luring dengan Daring.
5.	<i>Curent ratio</i>	Rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.
6.	Daring	Pelatihan dengan pertemuan tatap muka tidak langsung menggunakan media online.
7.	Diversifikasi	Strategi untuk mengurangi risiko dengan menempatkan dana atau investasi dalam berbagai jenis usaha, instrumen keuangan atau aset.
8.	Investasi	Pengeluaran uang atau sumber daya lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.
9.	<i>Invoice</i>	Tagihan atau faktur yang diberikan kepada pelanggan sebagai permintaan pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan.
10.	Kolektibilitas	Klasifikasi kemampuan pembayaran debitur ketika mereka hendak meminjam uang di sebuah lembaga keuangan.
11.	Likuiditas	Kemampuan untuk mengonversi aset menjadi uang tunai tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan
12.	Luring	Pelatihan dengan pertemuan tatap muka langsung di kelas/ruangan.
13.	Nisbah	Merupakan perkiraan imbalan yang diterima oleh pemilik modal dari pengelola modal
14.	<i>Offering later</i>	Surat penawaran bank atas persetujuan pembiayaan yang ditujukan kepada debitur

15.	Profitabilitas	Kemampuan suatu bisnis atau investasi untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan biaya atau investasi yang dikeluarkan.
16.	<i>Repayment capacity</i>	Kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar kembali pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya.
17.	Restrukturisasi	Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya
18.	<i>Scale up</i>	Proses meningkatkan ukuran atau omset operasi suatu bisnis atau proyek untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan
19.	Solvabilitas	Kemampuan suatu perusahaan atau individu untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.
20.	<i>Side streaming</i>	Penyalahgunaan dana pada sebuah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah
21.	Transparansi	Keterbukaan dan kejelasan dalam laporan keuangan dan aktivitas bisnis suatu entitas.

2. Referensi

1.	Kartawinata, B., et. al. (2020). Manajemen Keuangan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). In Penerbit Widina (1st ed.)
2.	Amanah, E. (2019). Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude dan External Locus of Control terhadap Personal Financial Management Behavior pada Mahasiswa S1 Universitas Telkom. Universitas Telkom.



Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Gedung Djuanda II Lantai 17, Kementerian Keuangan

Jl. Dr Wahidin Raya No.01 Jakarta Pusat